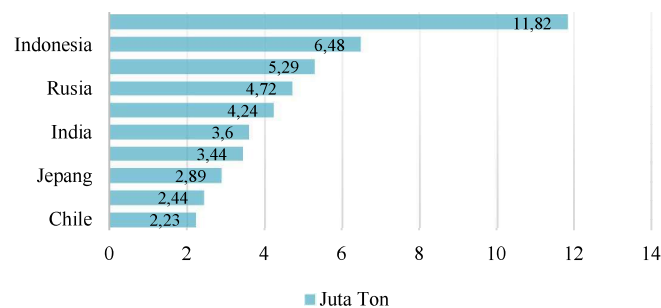


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi (Mardyani & Yulianti, 2020). Sektor perikanan berperan dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat di sekitar lingkungan sumber daya, tetapi juga meliputi suatu kawasan atau komunitas tertentu (Adrian dalam Loe, 2025). Potensi perikanan Indonesia cukup fantastis didasari pada letak geografis yang strategis di sekitar garis khatulistiwa serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut atau *mega biodiversity* (Heriza & Mulianingsih, 2023). Meskipun begitu, ditemukan suatu permasalahan mendasar terkait kontribusi kelautan dan perikanan yang masih rendah sehingga menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat nelayan (Soedarmo, 2018).



Gambar 1.1 Volume Produksi Perikanan Tangkap Global Tahun 2022

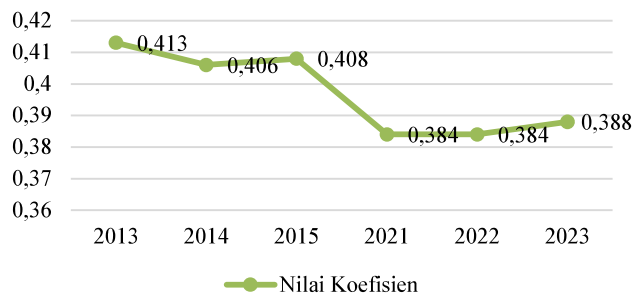
Sumber: databoks.katadata.co.id, 2024 (telah diolah kembali)

Data yang diperoleh dari laporan Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2022 menunjukkan volume produksi perikanan tangkap laut global mencapai 79,7 juta ton. Diketahui pada tahun 2022 negara di Asia menjadi penyumbang 50% dari total tangkapan laut global. China menduduki peringkat pertama sebagai produsen perikanan tangkap laut terbesar di dunia dengan volume 11,82 juta ton atau setara dengan 14,8% dari total keseluruhan produksi global. Kemudian, disusul Indonesia yang menempati peringkat kedua dengan hasil tangkapan sebesar 6,84 juta ton atau setara dengan 8,6% dari total produksi global. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa hasil laut yang melimpah.

Potensi perikanan di Indonesia sangat luar biasa, tetapi permasalahan mendasar mengenai kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang masih tergolong rendah, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat nelayan (Heriza & Mulianingsih, 2023). Kondisi ini berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh dari perikanan tangkap laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa pengelolaan sektor perikanan dan kelautan kurang optimal menyebabkan hasil laut yang dimiliki belum dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat nelayan sebagai kelompok yang bermukim di sekitar wilayah pesisir sangat rentan terhadap berbagai tantangan, meliputi perubahan iklim, masalah kesejahteraan sosial, dan potensi bencana alam.

Kehidupan masyarakat pesisir terutama nelayan identik dengan permasalahan kemiskinan (Abidin, 2017). Hubungan kemiskinan dapat ditunjukkan dengan Rasio Gini secara parsial (Suardi & Rival, 2024). Indeks

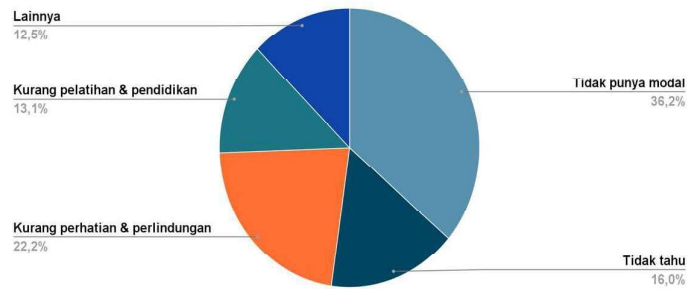
Rasio Gini Indonesia menunjukkan angka fluktuatif, di mana tingkat ketimpangan rendah dengan nilai koefisien  $<0,40$  selama tahun 2021 hingga 2023. Meskipun Rasio Gini Indonesia relatif merata, tetapi distribusi pendapatan belum sempurna. Hal ini ditunjukkan dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015, masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14% angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Bahkan, 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan, belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nelayan Indonesia memiliki tingkat taraf hidup yang belum sejahtera.



**Gambar 1.2 Rasio Gini Indonesia Tahun 2013 – 2015 dan 2021 – 2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2023 dihitung oleh Balai Besar Riset Sosial dan Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan menggunakan 14 indikator mencakup dimensi sosial, kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa capaian IKMKP 2023 sebesar 62,75 dengan capaian dimensi sosial kelembagaan sebesar 62,68 dan ekonomi sebesar 62,85. Realisasi IKMKP mencapai 100,14% dari target IKMKP 2023 sebesar 62,66 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024).



**Gambar 1.3 Faktor Penyebab Permasalahan Kemiskinan Nelayan**

Sumber: Kompas.com, 2022 (telah diolah kembali)

Kemiskinan masyarakat nelayan bersifat multidimensi yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya tidak memiliki modal, kurang mendapatkan perhatian atau perlindungan dari pemerintah, kurangnya pelatihan maupun pendidikan, tidak mengetahui alasannya, dan lain-lain. Keterbatasan pada kepemilikan modal membatasi nelayan untuk menangkap ikan dalam skala yang lebih besar dengan pemanfaatan teknologi modern. Kendala demikian, sering kali menyebabkan nelayan semakin lama berada dalam jurang kemiskinan struktural. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah untuk melindungi masyarakat nelayan dari ancaman ekonomi maupun lingkungan.

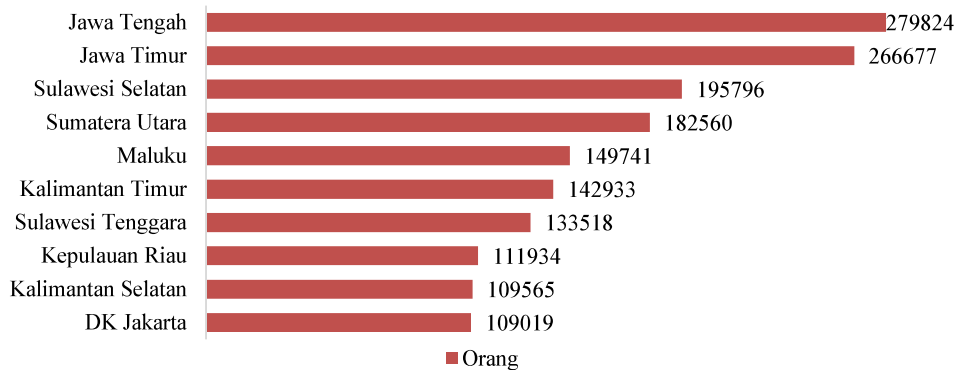
Mayoritas masyarakat nelayan memiliki status yang relatif rendah, terutama golongan nelayan buruh. Posisi sosial nelayan dapat dilihat dari sisi politis, salah satu ciri nelayan kecil adalah ketiadaan kemampuan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik. Akibatnya, nelayan akan berada dalam posisi dependen dan marginal secara terus menerus. Goodwin (dalam Utama & Wahyuni, 2016) mengemukakan bahwa faktor kapital menjadi faktor yang dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar pula kesempatan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik. Kekuatan

kapital atau nominal memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan politik, hukum, dan sosial (Utama & Wahyuni, 2016).

Kondisi masyarakat nelayan kian memburuk karena fenomena alam yang sering kali berdampak signifikan terhadap penurunan perolehan hasil tangkapan ikan. Perikanan skala kecil di negara berkembang menghadapi banyak hambatan sumber daya dan struktural yang membuat masyarakat nelayan rentan secara ekonomi (Susilowati & Mafruhah, 2023). Beberapa hambatan berkaitan dengan sumber daya, seperti ukuran kapal, kemampuan berlayar di laut, dan ketergantungan yang tinggi terhadap gelombang dan musim. Sementara itu, hambatan bersifat struktural yaitu ketidakpastian harga ikan di pasaran, tingginya biaya bahan bakar, dan kurangnya program pembangunan pesisir yang spesifik. Kondisi tersebut disebabkan oleh pesisir sebagai zona transisi antara lingkungan darat dan laut sehingga wilayah pesisir dipengaruhi oleh perubahan dan tekanan dari darat maupun laut (Kristiyanti, 2016).

Masyarakat yang menempati daerah sekitar wilayah pesisir sebagian besar bergantung pada sektor perikanan dalam hal ketersediaan komoditas laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Wahyudin, 2003). Sektor perikanan kecil menjadi penopang bagi masyarakat nelayan miskin yang jumlahnya sangat masif (Sudarmono, 2021). Pendapat lain dikemukakan oleh (Afifah dkk., 2024) mengemukakan bahwa nelayan sebagai mayoritas penduduk di daerah pesisir sangat bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan ekonomi dan sosial. Nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan dan lebih terdampak oleh perubahan iklim cenderung mengalami ketidaksetaraan ekonomi, yang berpotensi

memunculkan ketidakpuasan dan ketegangan di dalam komunitas. Selain mempersulit nelayan, hal ini menciptakan tantangan besar dalam mempertahankan mata pencaharian mereka.



**Gambar 1.4 Jumlah Nelayan di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2023**

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023 (telah diolah kembali)

Terlebih, jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 3.205.512 orang (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Angka ini terus mengalami kenaikan sejak lima tahun terakhir, sekurang-kurangnya terjadi peningkatan jumlah nelayan sebesar <0,6% per tahun. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama dengan jumlah nelayan terbanyak se-Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023, jumlah nelayan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 279.824 orang. Adapun secara rinci nelayan dibagi menjadi dua, yaitu nelayan laut sebanyak 227.900 orang dan nelayan perairan darat sejumlah 51.924 orang.

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, yaitu Nilai Tukar Nelayan atau NTN (Poernomo dkk., 2017). Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang

dinyatakan dengan persentase. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang yang dihasilkan nelayan, dalam hal ini hasil penangkapan ikan terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang melebihi 100, maka artinya nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya atau disebut surplus. Sebaliknya, ketika NTN kurang dari 100 berarti pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi lebih besar dari uang yang diperoleh dari hasil menjual ikan atau disebut defisit.

**Tabel 1.1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Per Provinsi di Pulau Jawa 2024**

No.	Provinsi	NTN (2024)	TW1-2024	TW2-2024	TW3-2024	TW4-2024
1.	Banten	96,51	96,44	96,28	96,2	97,1
2.	DIY	116,68	115,44	115,95	117,25	118,1
3.	DK Jakarta	105,28	104,97	104,7	105,71	105,72
4.	Jawa Barat	112,45	112,89	112,59	112,88	111,45
5.	Jawa Tengah	101	101,66	101,59	100,2	100,56
6.	Jawa Timur	94,58	94,25	94,42	94,15	95,52

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024 (telah diolah kembali)

Jika diamati lebih lanjut, Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa nelayan di Provinsi Jawa Timur mengalami defisit yang artinya pengeluaran nelayan lebih besar dibandingkan pemasukan dari hasil perolehan menjual ikan. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif dan menunjukkan surplus, meskipun masih menempati urutan keempat di antara 6 (enam) provinsi lain di Pulau Jawa. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan sejak Triwulan I hingga Triwulan IV, meskipun begitu angka ini masih cukup stabil.

Masyarakat nelayan sudah melekat dengan stigma kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mubyarto et. al. dalam Nugroho (2015) menjelaskan bahwa

masyarakat pesisir atau nelayan selalu identik dengan kebodohan dan keterbelakangan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Abidin (2017) yang menyebutkan bahwa masyarakat nelayan sering disebut kelompok termiskin di antara yang miskin (*the poorest of the poor*). Berkembang stereotip bahwa wilayah pesisir umumnya dihuni oleh masyarakat bertaraf ekonomi rendah dan keadaan lingkungan yang kumuh serta terbelakang (Nugroho, 2015).

Pendapat tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat pesisir di Desa Bendar di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Mayoritas masyarakat Desa Bendar berprofesi sebagai nelayan memiliki tingkat kesejahteraan menengah hingga menengah ke atas (Sa'idah dkk., 2024). Ditandai dengan karakteristik permukiman nelayan Desa Bendar yang berbeda dengan permukiman nelayan pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sa'idah, dkk. (2024), menyebutkan kondisi permukiman nelayan Desa Bendar menunjukkan tingginya tingkat perekonomian masyarakatnya, serta tempat tinggal yang cukup elite.

Kabupaten Pati dikenal dengan semboyan “Bumi Mina Tani” merupakan akronim dari B (Berdaya), U (Upaya), M (Menuju), I (Identitas), M (Makmur), I (Ideal), N (Normatif), A (Adil), T (Tertib), A (Aman), N (Nyaman), I (Indah). Slogan tersebut menggambarkan potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pati di sektor pertanian (tani) dan sektor perikanan (dalam bahasa Sansekerta: mina). Berbatasan langsung dengan laut, Kabupaten Pati menjadi salah satu penghasil ikan laut di Jawa Tengah, dengan delapan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar di empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Juwana, Batangan, Tayu, dan Dukuhseti.

Diketahui terdapat delapan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar di Kabupaten Pati, di antaranya TPI Unit 1 Juwana, TPI Unit 2 Juwana, TPI Banyutowo, TPI Puncel, TPI Alasdowo, TPI Margomulyo, TPI Sambiroto, dan TPI Pecangaan. Dikutip dari Mondez.co.id, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang masih aktif beroperasi pada tahun 2023 hanya tersisa 4 unit, secara keseluruhan berada di Kecamatan Juwana, yaitu TPI Unit 1 Juwana, TPI Unit 2 Juwana, TPI Banyutowo, dan TPI Puncel.

**Tabel 1.2 Nilai Produksi Perikanan Laut (dalam Rp.) di Kabupaten Pati Tahun 2017-2019**

No.	TPI	Jumlah Produksi (Rp.)		
		2017	2018	2019
1.	TPI Unit 1 Juwana	46.702.000.000	36.249.000.000	77.356.000.000
2.	TPI Unit 2 Juwana	588.268.500.000	208.974.840.000	446.741.304.000
3.	Pecangaan Batangan	631.788.200	357.894.100	635.449.600
4.	Margomulyo Tayu	537.422.600	296.789.400	453.232.200
5.	Sambiroto Tayu	346.935.200	218.368.000	418.244.600
6.	Alasdowo Dukuhseti	453.288.800	258.228.000	451.692.000
7.	Banyutowo Dukuhseti	6.640.384.820	2.582.335.000	4.110.936.000
8.	Puncel Dukuhseti	5.367.914.000	2.464.307.000	5.249.238.000
<b>Jumlah</b>		<b>648.948.233.620</b>	<b>251.401.761.500</b>	<b>535.416.096.400</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan laut tertinggi di Kabupaten Pati dimiliki oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I dan Unit II Juwana. Kedua TPI ini terletak Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana yang berdekatan dengan Desa Bendar. Nilai produksi perikanan laut cukup fantastis dibandingkan dengan enam TPI lainnya di sekitar Kabupaten Pati. Jumlah produksi yang tinggi menandakan adanya aktivitas penangkapan ikan secara besar-besaran yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Juwana. Oleh karena itu, perekonomian

nelayan di Kecamatan Juwana dapat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan TPI lain di Kabupaten Pati.

Selain memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kecamatan Juwana memiliki kelompok usaha bersama, koperasi, bahkan komunitas nelayan yang mewadahi masyarakat nelayan dalam menunjang kebutuhan hidup. Menurut Richmond & Casali (2022), komunitas nelayan baik dalam skala kecil maupun besar menghadapi tantangan tersendiri termasuk pada perubahan kondisi iklim lingkungan, penurunan pendapatan, aturan yang dinilai terbatas, serta infrastruktur lain yang mendorong komunitas nelayan untuk berpikir mendalam. Komunitas nelayan yang terletak di Desa Bendar Kecamatan Juwana bernama Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) merasakan hal serupa terkait dengan aturan atau kebijakan pemerintah yang dinilai kurang adaptif terhadap kondisi riil nelayan.



**Gambar 1.5 Nelayan Juwana Gelar Aksi Protes dengan Bagikan Ikan Gratis**

Sumber: RRI.co.id, 2023

Masyarakat nelayan umumnya digambarkan sebagai kelompok marginal yang tidak berdaya dan lemah dalam sisi politis, atau tidak mampu memberi pengaruh pada kebijakan publik. Kondisi ini berbeda dengan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana yang telah melakukan advokasi kebijakan melalui diskusi, lobi, dan demonstrasi. Aksi demonstrasi digelar dengan membagikan 120

ton ikan hasil tangkapan ketika *acara car free day* (CFD) di Alun-alun Pati sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menghambat nelayan untuk berkembang. Unjuk rasa ini sebagai puncak atau jalan terakhir dari serangkaian diskusi dan keluhan yang telah mereka sampaikan kepada pemerintah, tetapi belum mendapatkan respons yang memuaskan.

Mengutip dari RRI.co.id, Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana mengeluhkan kebijakan impor ikan dan penetapan harga acuan ikan (HAI) yang dinilai tidak memperhatikan kondisi riil. Kondisi ini memunculkan gejolak bagi nelayan Juwana sebab ikan hasil tangkapannya tidak terserap oleh pasar. Selain itu, kebijakan harga acuan ikan (HAI) yang ditetapkan pemerintah yang dirasa cukup tinggi dan kurang mempertimbangkan harga di pasaran anjlok. Bahkan, dalam wawancara detikJateng dengan nelayan yang ikut dalam demonstrasi terungkap keresahan terkait kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang memberatkan nelayan. Lantaran, PNBP dengan jumlah berkisar antara Rp 80 juta hingga Rp 120 juta harus tetap dibayarkan, meskipun nelayan tidak melaut. Keresahan nelayan Juwana ini menuntut agar kebijakan dapat menyesuaikan dengan kondisi riil lapangan.

Berbagai kajian ilmiah menyoroiti persoalan masyarakat nelayan yang cenderung identik dengan permasalahan ketidakberdayaan dan berkepanjangan. Beberapa permasalahan tersebut belum mendapatkan solusi sehingga menjadi tantangan bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Anggapan bahwa profesi nelayan belum aman dan belum menjanjikan dapat memberikan kesejahteraan. Hal tersebut ditandai oleh sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

yang sudah tidak beroperasi lagi. Anomali lain seperti keluarga nelayan yang mendorong anak mereka untuk tidak mengikuti jejak menjadi nelayan. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, diperlukan upaya untuk melakukan perubahan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan saat ini dalam menciptakan perubahan tersebut adalah pemberdayaan.

Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan upaya untuk mengembangkan potensi individu dengan cara memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki, serta berusaha untuk mengasah potensi tersebut melalui proses pembelajaran yang terencana dan sistematis. Selain itu, pemberdayaan dapat diamati dalam setiap komunitas yang memiliki potensi untuk ditingkatkan (Afriansyah dkk., 2023). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan yang dilakukan Paguyuban MNS Juwana bukan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan pemilik kapal, tetapi mencakup usaha untuk memberdayakan anggota yang kurang mampu dalam mengakses sumber-sumber politik. Hal ini mendorong terwujudnya kegiatan advokasi kebijakan dalam menghadapi tantangan kebijakan pemerintah yang dapat dilihat dengan meningkatnya *bargaining position* nelayan di pemerintahan. Nelayan yang

sukses dapat menjadi model bagi rekan-rekan nelayan lainnya yang masih berkubang dengan masalah serupa.

Kajian mengenai pemberdayaan nelayan di Indonesia telah banyak dilakukan, di antaranya seperti Irawan & Tanzil (2020), Suwandi & Prihatin (2020), Nugroho (2015), Purnomo dkk. (2021), serta Abidin (2017). Karya-karya tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam terkait pemberdayaan nelayan dan persoalan yang dihadapi di Indonesia. Namun, dari tinjauan literatur yang ada, fokus kajian pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui komunitas atau paguyuban nelayan yang diinisiasi dan dikelola oleh nelayan itu sendiri dalam perspektif teori pemberdayaan tampaknya masih terbatas.

Pemberdayaan masyarakat harus bersifat inklusif, yang berarti melibatkan secara aktif masyarakat yang menjadi target program. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melaksanakan pemberdayaan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dari masyarakat yang diberdayakan (Afriansyah dkk., 2023). Upaya yang dapat mengubah tantangan atau hambatan menjadi potensi pengembangan yang menguntungkan, diperlukan kemauan masyarakat nelayan sendiri untuk mengupayakan hal tersebut. Demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan komunitas masyarakat nelayan, terutama Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana menjadi penting untuk dibahas.

Penelitian ini membatasi kajiannya terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunitas atau kelompok yang diinisiasi dan dibentuk oleh nelayan sendiri dengan fokus analisis pada Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana yang terletak di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Berbeda

dengan studi yang dilakukan oleh Suwandi & Prihatin (2020) yang berjudul “Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra di Jepara, Indonesia”, yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat nelayan melalui inisiatif kelompok usaha bersama (KUB) untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini akan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat nelayan dengan lokus penelitian pada Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Di mana lokus tersebut memiliki kondisi ekonomi menengah hingga menengah ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan yang diterapkan oleh Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dalam upaya peningkatan keberdayaan komunitas pesisir di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada teori tahapan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dikemukakan oleh Suwandi & Prihatin (2020), yang merupakan pengembangan dari model tiga tahapan pemberdayaan oleh Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007), meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Kerangka teoretis ini digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji secara komprehensif pemberdayaan yang berlangsung di Paguyuban MNS Juwana. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Pemberdayaan menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan di Desa Bendar melalui keterlibatan langsung masyarakat nelayan dalam kegiatan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana. Tanpa adanya pemberdayaan secara berkelanjutan, masyarakat akan kesulitan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan gambaran tahapan yang dilakukan oleh Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dalam melakukan serangkaian pemberdayaan. Hal ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi komunitas lain yang ingin meniru Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memberikan judul penelitian berupa **“ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI PAGUYUBAN MITRA NELAYAN SEJAHTERA JUWANA KABUPATEN PATI”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik pembahasan, antara lain:

1. Masyarakat nelayan memiliki posisi tawar yang lemah dalam memengaruhi kebijakan publik sehingga kebijakan pemerintah cenderung kurang responsif terhadap kondisi riil nelayan. Utama & Wahyuni (2016) menjelaskan bahwa posisi sosial nelayan kecil dilihat dari sisi politis dicirikan dengan ketiadaan kemampuan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik. Akibatnya, nelayan akan berada dalam posisi dependen

dan marginal secara terus menerus. Sejalan dengan pendapat tersebut, tesis Goodwin (dalam Utama & Wahyuni, 2016) mengemukakan bahwa faktor kapital menjadi faktor yang dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar pula kesempatan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik.

2. Profesi nelayan masih identik dengan stigma negatif berupa kemiskinan dan keterbelakangan. Mubyarto et. al. (dalam Nugroho, 2015) menyatakan bahwa sebutan masyarakat pesisir atau nelayan selalu menunjuk pada lapisan kelompok yang identik dengan kebodohan dan keterbelakangan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Abidin (2017) yang menyebutkan bahwa masyarakat nelayan sering disebut kelompok termiskin di antara yang miskin (*the poorest of the poor*).
3. Ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam meningkatkan kerentanan ekonomi sehingga berdampak pada profesi nelayan yang kian ditinggalkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Afifah, dkk. (2024) mengemukakan bahwa sebagai mayoritas penduduk di daerah pesisir pantai, nelayan sangat bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan ekonomi dan sosial. Nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan dan lebih terdampak oleh perubahan iklim cenderung mengalami ketidaksetaraan ekonomi, yang berpotensi memunculkan ketidakpuasan dan ketegangan di dalam komunitas. Selain mempersulit nelayan, hal ini menciptakan tantangan besar dalam mempertahankan mata pencaharian mereka.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Menganalisis pemberdayaan masyarakat pesisir yang diterapkan oleh Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati.
2. Menganalisis unsur atau faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peneliti sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan tugas akhir program studi

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat nelayan secara komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian mendatang yang mengkaji pemberdayaan masyarakat nelayan atau komunitas pesisir yang serupa.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

1. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dalam mengoptimalkan program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat pesisir secara umum.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan yang lebih efektif.
3. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi organisasi sosial lain yang ingin mengimplementasikan pemberdayaan yang serupa di komunitas mereka.

## **1.6. Kajian Teori**

### **1.6.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik

yang diangkat dalam penelitian. Berikut ini merupakan kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya, berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No (1)	Judul Artikel, Peneliti, Tahun (2)	Metode Penelitian (3)	Tujuan Penelitian (4)	Landasan Teori (5)	Hasil Penelitian (6)	Perbedaan (7)
1.	<p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Empowerment of the Fisherman Community Based on Local Wisdom in the Administration District of a Kepulauan Seribu DKI Jakarta Province</i> (Purnomo dkk., 2021)</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4), 9085-9094.</p> <p><b>Link:</b> <a href="https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2904">https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2904</a></p>	Metode Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model baru pemberdayaan pada komunitas nelayan berbasis kearifan lokal, modal alam dan modal sosial terakselerasi dengan tupoksi OPD penyedia layanan dan barang publik.	Teori Latopa dan Saidu (2015) membahas mengenai <i>community development</i> berbasis <i>local wisdom</i> , berlandaskan nilai inti sebagai berikut: 1) <i>Self-esteem</i> ; 2) <i>Freedom to Serve</i> ; dan 3) <i>Sustainability is associated with social capital and natural capital</i> .	Hasil penelitian adalah pemberdayaan nelayan Kepulauan Seribu berhasil meningkatkan kualitas hidup dan daya saing. Modal sosial dan modal alam terakselerasi melalui kemudahan akses pelayanan dan barang publik. Zonasi memungkinkan pengelolaan objek wisata dengan karakteristik berbeda-beda secara berkelanjutan.	Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan komunitas nelayan. Perbedaan terletak pada pemilihan teori pemberdayaan dan lokus penelitian.
2.	<p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Empowering of Coastal Community Ecotourism: The Role of Cultural Entrepreneurship Among Fishermen in West Sumatra, Indonesia</i> (Zamzami dkk., 2025)</p> <p><b>Nama Jurnal:</b></p>	Metode Kualitatif	Penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas penerapan dan potensi kewirausahaan budaya masyarakat nelayan dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi.	<i>Cultural Entrepreneurship:</i> 1) Meningkatkan mata pencaharian; 2) Melestarikan budaya; 3) Mendorong pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan	Temuan penelitian menunjukkan bahwa nelayan berhasil memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan nilai tambah, menghasilkan peningkatan ekonomi. Namun, tantangan akses pasar yang terbatas dan kapasitas kewirausahaan yang tidak memadai, saat ini menghambat realisasi penuh potensi	Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan suatu komunitas nelayan. Perbedaan terletak pada pemilihan aspek teori pemberdayaan dan lokus penelitian. Penelitian ini berlokus di Sumatera Barat.

Geojournal of Tourism and Geosites, 58(1), 396-404. <b>Link:</b> <a href="https://doi.org/10.30892/gtg.58136-1421">https://doi.org/10.30892/gtg.58136-1421</a>									
3.	<b>Judul Penelitian:</b> Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Irawan & Tanzil, 2020) <b>Nama Jurnal:</b> Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, 9(2), 129-139. <b>Link:</b> <a href="https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3121/1779">https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3121/1779</a>	Metode Deskriptif Kualitatif	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat pesisir perbatasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.	Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir (Kuncoro, 2006): 1) Internal 2) Eksternal 3) Kelembagaan	Teori Pemberdayaan oleh Teguh S. dengan aspek sebagai berikut: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 2) Tahap transformasi kemampuan 3) Tahap peningkatan intelektual	budaya dan ekowisata.	kewirausahaan budaya di komunitas nelayan.		
4.	<b>Judul Penelitian:</b> <i>Women's empowerment to alleviate poverty in coastal zones: a case study of fisherwomen in Pacitan, Indonesia</i> (Susilowati & Mafruhah, 2023) <b>Nama Jurnal:</b> International Journal of Ethics and Systems, 39(1), 165-179.	Metode Campuran Sekuensial	Penelitian ini untuk melakukan identifikasi masalah yang memengaruhi pemberdayaan perempuan nelayan dan menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan perempuan nelayan.	Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir (Kuncoro, 2006): 1) Internal 2) Eksternal 3) Kelembagaan	Hasil penelitian menunjukkan tiga indikator pemberdayaan masyarakat pesisir perbatasan. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dilaksanakan melalui sosialisasi. Pendampingan kurang rutin. Tahap transformasi kemampuan memberikan pelatihan teknik pengolahan ikan, manajemen keuangan dan pemasaran. Tahap peningkatan intelektual peningkatan pendirian usaha perikanan masyarakat sekitar 43 %.	budaya dan ekowisata.	kewirausahaan budaya di komunitas nelayan.		

<p><b>Link:</b>  <a href="https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0237">https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0237</a></p>	<p><b>Metode</b>  <i>Action Research</i></p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui pola hidup nelayan, modal usaha yang dimiliki nelayan, serta merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan yang tepat guna merubah kehidupan nelayan lebih baik.</p>	<p>Fokus pemberdayaan masyarakat nelayan, yaitu:  1) Pola hidup nelayan (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya)  2) Modal usaha yang dimiliki nelayan  3) Konsep kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hidup nelayan, interaksi sosial dan budaya masyarakat nelayan Kabupaten Pasuruan masih kuat, sementara tingkat pendapatan masih rendah; manajemen modal usaha nelayan, belum memberikan peningkatan pendapatan; dan kebijakan pengembangan ekonomi produktif usaha pengolahan hasil perikanan berkelanjutan dengan pelatihan.</p>	<p>Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan. Perbedaan penelitian ini terletak pada pemilihan aspek teori pemberdayaan dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasuruan.</p>
<p><b>Link:</b>  <a href="https://doi.org/10.35891/tp.v6i1.464">https://doi.org/10.35891/tp.v6i1.464</a></p>	<p><b>Metode</b>  Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini untuk mengkaji upaya pemberdayaan nelayan dengan fokus pada masyarakat nelayan di Jepara yang mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berkah Samudera.</p>	<p>Tahapan Pemberdayaan meliputi penumbuhan kesadaran dalam diri anggota dan masyarakat nelayan; Peningkatan kapasitas individu dan kelompok sebagai penunjang keberdayaan, serta; Peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan .</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa penyadaran anggota akan potensi yang dimiliki; peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan yang menunjang kegiatan nelayan dan keluarganya secara individu maupun sebagai anggota kelompok; serta pendayaan anggota dengan keberdayaan masyarakat yang baik dari aspek ekonomi dan sosial.</p>	<p>Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan suatu kelompok usaha bersama (KUB) nelayan. Perbedaan terletak pada pemilihan lokasi penelitian. Lokasi penelitian di Kabupaten Jepara.</p>

	<p><b>Link:</b>  <a href="https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jisipo/article/view/9451">https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jisipo/article/view/9451</a></p>				<p><b>Link:</b>  <a href="https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/view/1081">https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/view/1081</a></p>	
7.	<p><b>Judul Penelitian:</b>  Pengelolaan Program Kelompok Usaha Bersama Nelayan Bondet Zenawi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  (Sulamah dkk., 2016)</p> <p><b>Nama Jurnal:</b>  Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi.</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan program dan pengaruh dari adanya program KUB BONZEN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.</p>	<p>Faktor-faktor yang menimbulkan persoalan nelayan (Kusnadi, 2003):  -Meningkatnya kelangkaan SDI;  2) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;  3) Keterbatasan kualitas SDM;  4) Ketimpangan akses terhadap SDI; serta  5) Lemahnya potensi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Desa Grogol mengalami berbagai persoalan struktural. Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUB) BONZEN di Desa Grogol sudah berjalan dengan efektif memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan pendampingan yang dilakukan sudah sesuai dengan indikator pedoman KUB.</p>	<p>Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai pemberdayaan suatu keompok usaha bersama (KUB) nelayan. Perbedaan penelitian ini terletak pada pemilihan aspek teori pemberdayaan dan locus penelitian. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan di komunitas nelayan dan berlokasi di Desa Grogol, Kabupaten Cirebon.</p>
8.	<p><b>Judul Penelitian:</b>  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas  (Firman, 2021)</p> <p><b>Nama Jurnal:</b>  Ar Rehla: Journal of Islamic Jurnal Tata Sejuta, 7(1), 132-146.</p> <p><b>Link:</b>  <a href="https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196">https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196</a></p>	<p>Metode Literatur Review</p>	<p>Penelitian ini untuk memberikan gambaran konsep pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas dan bagaimana implementasinya di Indonesia secara umum.</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat dilihat aspek berikut:  1) Aspek Sosial;  2) Aspek Politik;  3) Aspek Ekonomi; dan  4) Aspek Kearifan Lokal Masyarakat.</p>	<p>Hasil kajian menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas. Pemberdayaan memberikan peran kepada masyarakat berpartisipasi Pelibatan komunitas lokal membangun konstruksi sosial politik yang positif. Aspek ekonomi dan budaya, pemberdayaan memperkuat peran masyarakat desa, memperkuat aspek kultur sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir. Perbedaan penelitian terletak pada teori dan locus penelitian. Locus penelitian secara nasional atau Indonesia.</p>

9.	<p><b>Judul Penelitian:</b> Literature Review : Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Sonia, 2022)</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Jurnal Syntax Admiration, 3(7), 896-904.</p> <p><b>Link:</b> <a href="https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.457">https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.457</a></p>	Metode Literatur Review	Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.	Pemberdayaan masyarakat dilihat peran dan fungsi pemerintah (Harris, 2014), antara lain: 1) Pemerintah sebagai regulator; 2) Pemerintah sebagai dinamisor; dan 3) Pemerintah sebagai fasilitator.	Hasil kajian menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan kesehatan pada masyarakat pesisir masih kurang optimal karena masih ada masyarakat yang belum memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah, dan kurangnya anggaran untuk menjalankan program.	Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori dan lokus penelitian. Lokus penelitian secara nasional atau Indonesia dengan tiga daerah sebagai contoh.
10.	<p><b>Judul Penelitian:</b> Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa (Margayaningsih, 2018)</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Publiciana, 11(1), 72-88.</p> <p><b>Link:</b> <a href="https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140">https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140</a></p>	Metode Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat dalam pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Waung.	Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan dibagi menjadi 4: 1) Motivasi; 2) Kebijaksanaan Pemerintah; 3) Anggaran; dan 4) Sarana dan Prasarana	Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran masyarakat sebagai pelaku, partisipan, dan peserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah motivasi dan kebijaksanaan, sedangkan anggaran serta sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat pemberdayaan di Desa Waung.	Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mengenai pemberdayaan masyarakat dengan kesamaan faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan. Perbedaan pada teori peran. Sementara, lokus penelitian di Desa Waung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Tabel 1.3 merupakan jurnal penelitian yang dijadikan sebagai referensi dan dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang sudah dibahas sebelumnya terkait pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari jurnal penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam rumusan tahapan pemberdayaan yang berbeda untuk menggambarkan proses pemberdayaan tersebut. Temuan dalam jurnal yang membahas pemberdayaan masyarakat nelayan menggunakan teori Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. Adapun keunggulan dari teori pemberdayaan yang mempunyai 3 tahapan, meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007), yaitu lebih mudah dan jelas digunakan karena mampu menyederhanakan fenomena-fenomena kompleks untuk membentuk model implementasi kebijakan yang tidak rumit.

Penelitian terdahulu oleh Suwandi & Prihatin (2020) dalam penelitian berjudul “Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra di Jepara, Indonesia” menggunakan teori tahapan pemberdayaan oleh Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007). Teori tahapan pemberdayaan tersebut merupakan teori yang sama yang akan digunakan oleh penulis dalam menjelaskan fenomena terkait pemberdayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana. Meskipun memiliki persamaan dari segi teori yang digunakan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni terkait lokus penelitian dan variabel faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses pemberdayaan, di mana hal tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

### 1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata bahasa Inggris “*Administration*” yang artinya *to serve* atau sebagai upaya melayani dengan sebaik-baiknya (Warsono dkk., 2019). Siagian (Tresiana & Duadji, 2018) mengartikan administrasi sebagai proses melaksanakan hasil keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, publik berasal dari kata serapan bahasa Inggris public, identik digunakan bangsa Indonesia untuk menyatakan masyarakat (Sellang, 2016). Kata masyarakat secara umum merujuk pada rakyat. Istilah ‘publik’ sangat tepat digunakan bersama ‘administrasi’ yang menggambarkan pengelolaan kepentingan publik. Istilah ‘publik’ berakar dari bangsa Romawi, dalam bahasa Romawi dan Yunani publik disebut *res publica* sedangkan privat disebut *res private*.

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (1988) adalah proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan terkait kebijakan publik (Sellang, 2016). Chandler dan Plano juga mengemukakan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu untuk mengatur *public affairs* (urusan publik) serta melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai ilmu fokus pada penyelesaian masalah-masalah publik. Administrasi publik berupaya melembagakan praktik manajemen yang sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Menurut Nicholas Henry dalam Meutia (2017), topik dalam ilmu administrasi publik berkaitan dengan:

- a. Organisasi publik, berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi.

- b. Manajemen publik, menyangkut sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, berkenaan kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Administrasi publik telah berkembang ke arah pembangunan. Administrasi publik berfokus terhadap pelaksanaan dan pencapaian dari tujuan pembangunan. Administrasi publik menurut Frederick A. Cleveland (Tresiana & Duadji, 2018) menunjukkan peran krusial dalam memberdayakan masyarakat dengan menciptakan demokrasi. Administrasi publik memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalisme. Rondinelli (dalam Tresiana & Duadji, 2018) mengungkapkan bahwa peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar mencapai *democracy governance*. Hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi, pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik maupun swasta.

### **1.6.3. Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan disiplin ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau paradigma yang terjadi. Kuhn (1970) mendefinisikan paradigma sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diadopsi oleh komunitas ilmiah pada periode tertentu (Kuhn dalam Sellang, 2016). Cara pandang yang menghadapi tantangan eksternal

dan mengalami krisis atau anomali, mengurangi kepercayaan dan otoritas dari cara pandang tersebut. Hal ini mendorong individu untuk menemukan cara pandang yang lebih relevan sehingga melahirkan paradigma baru. Perkembangan ilmu administrasi publik turut menghadapi anomali beberapa kali, tampak dari pergeseran antara paradigma lama dan baru, sebagaimana diungkapkan oleh Nicholas Henry (1995).

Nicholas Henry menyatakan bahwa standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus (Tresiana & Duadji, 2018). Fokus berkenaan dengan sesuatu yang menjadi inti atau metode dasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, lokus mencakup keselarasan bidang atau area di mana metode dapat diterapkan. Berdasarkan dua kategori tersebut, Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2020) mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik dan satu paradigma sebagai berikut.

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1990-1926)

Lokus dari paradigma dikotomi politik administrasi adalah menempatkan di mana seharusnya administrasi publik ini berada. Fase ini membedakan antara administrasi dan politik negara. Paradigma ini menjelaskan dua fungsi, yakni politik berpusat pada kebijakan dari kehendak rakyat, dan administrasi. Fokus ilmu administrasi publik dalam paradigma ini terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan.

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Lokus dari paradigma prinsip-prinsip administrasi negara tidak diperjelas karena mementingkan fokusnya pada prinsip-prinsip administrasi. Administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas berupa administrasi negara dapat diterapkan di mana pun meski berbeda kebudayaan, lingkungan, visi, dan lainnya.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi negara tidak bebas untuk diterapkan di mana pun, tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bersinggungan antara nilai administrasi negara dan politik. Umar (Pasolong, 2020) menyebutkan bahwa administrasi negara pada fase ini berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Terdapat dua perkembangan meliputi: (1) penggunaan studi kasus sebagai sarana yang bersifat epistemologi, (2) adanya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari ilmu administrasi.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Fokus paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, analisis sistem dan lain sebagainya. Pada fase ini administrasi negara berkembang sebagai ilmu administrasi. Administrasi negara sebagai paradigma memberikan fokus, tetapi tidak ada lokus.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik berkaitan dengan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sementara lokus

paradigma ini berkaitan dengan masalah dan kepentingan publik. Paradigma ini menjelaskan mengenai fokus yang akan dipelajari di dalam studi Administrasi Publik dan juga lokus atau tempat di mana teori itu dapat diimplementasikan. Kejelasan antara fokus dan lokus memunculkan keterkaitan antara berbagai teori yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah publik.

#### 6. Paradigma *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma *governance* menempatkan pemerintahan tidak hanya sebagai suatu kegiatan, tetapi pemerintahan sebagai pihak yang menjalankan fungsi sebagai pengolah, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. *Governance* sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan melibatkan tiga unsur, antara lain pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Paradigma ini mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan pemerintah menjalankan perannya untuk menciptakan lingkungan politik dan produk hukum yang kondusif, sedangkan privat atau swasta memiliki peran untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma administrasi publik penulis menyimpulkan bahwa ilmu administrasi publik mengalami perkembangan dengan penyesuaian zaman atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma yang terjadi merupakan respons dari adanya permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui pengkajian masalah yang didasari pada teori dari para ahli.

#### 1.6.4. Manajemen Publik

Menurut James Stoner (Widiana, 2020), manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Overman (dalam Sudarmanto dkk., 2020) mengemukakan bahwa manajemen publik tidak dapat disamakan dengan *scientific management*, meskipun memiliki pengaruh yang signifikan. Manajemen publik bukanlah analisis kebijakan, dan bukan sekadar ‘administrasi publik baru’. Berdasarkan penjelasan dari beberapa pakar, penulis menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar mampu memberikan manfaat dan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nor Ghofur (dalam Sudarmanto dkk., 2020), manajemen publik didefinisikan sebagai manajemen pemerintah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut George R. Terry (Rohman, 2017), fungsi-fungsi manajemen yang bersifat universal menggunakan akronim POAC, mencakup:

- 1) Perencanaan (*Planning*) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya merumuskan program mencakup semua hal yang akan dilaksanakan, penetapan tujuan, kebijakan, arah yang akan diambil, serta prosedur dan metode yang akan diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan melibatkan pemilihan fakta-fakta dan usaha untuk menghubungkan satu

fakta dengan fakta lainnya, serta membuat estimasi dan ramalan mengenai kondisi di masa depan serta merumuskan tindakan yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah proses menghubungkan individu dan menyelaraskan tugas serta tujuan mereka dalam organisasi. Proses ini dilakukan melalui pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing, sehingga tercipta hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, dan harmonis dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
- 3) Pelaksanaan (*Actuating*) adalah implementasi instruksi bagi para pemegang jabatan dalam organisasi. Pelaksanaan melibatkan kekuasaan hierarkis, di mana seorang manajer memberikan instruksi, perintah, dan saran kepada bawahannya.
- 4) Pengoordinasian (*Controlling*) merupakan proses integrasi dan penyesuaian seluruh aktivitas dengan berbagai tugas dan kegiatan yang berbeda memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Koordinasi yang efektif dapat mencegah terjadinya konflik atau kebingungan dalam tindakan.

Manajemen tidak akan sempurna tanpa kehadiran dari elemen-elemen pokok. Dalam manajemen, George R. Terry (Rohman, 2017) berpendapat bahwa terdapat enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, meliputi:

- a. *Man* (manusia), sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam manajemen karena merancang, menjalankan, maupun mengevaluasi proses.
- b. *Material* (bahan), dalam proses pelaksanaan kegiatan membutuhkan material atau bahan-bahan.

- c. *Machine* (mesin), adanya kemajuan teknologi yang memudahkan proses produksi.
- d. *Method* (metode), acuan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- e. *Money* (uang), unsur manajemen untuk membeli material, pembayaran gaji, dan sebagainya.
- f. *Markets* (pasar), untuk memasarkan produk yang dihasilkan.

Manajemen merupakan proses yang bertujuan untuk mencapai sasaran, dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk memberikan usaha terbaik melalui tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Usaha dan tindakan tersebut mencakup pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan, penetapan metode pelaksanaan, pemahaman tentang cara pelaksanaan, serta pengukuran efektivitas dari upaya yang dilakukan. Manajemen publik dapat diterapkan di berbagai sektor publik, termasuk dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan.

#### **1.6.5. Masyarakat Nelayan**

Masyarakat pesisir identik dengan sebutan masyarakat nelayan, hal ini karena sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Masyarakat nelayan terdiri atas kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial, serta memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka. Faktor budaya ini membedakan masyarakat nelayan dari

kelompok masyarakat lain. Mayoritas masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada potensi sumber daya perikanan untuk keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan terbagi menjadi empat, yaitu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal. Kriteria dari empat jenis nelayan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Nelayan kecil melakukan penangkapan ikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan berukuran maksimal 10 GT (*gross tonnage*).
2. Nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan dengan peralatan minim dan mendapatkan hasil yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, umumnya dilakukan secara turun-temurun.
3. Nelayan buruh tidak memiliki alat tangkap ikan dan hanya mengandalkan tenaganya untuk bekerja dalam usaha penangkapan ikan di kapal milik orang lain.
4. Nelayan pemilik kapal memiliki kapal penangkap ikan dan mempekerjakan nelayan buruh sebagai awak kapal perikanan.

Pendapat lain muncul dari Charles (dalam Abidin, 2017) yang membagi kelompok nelayan menjadi empat kelompok, yakni: (1) nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri; (2) nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yang mempunyai

kesamaan karakter dengan kelompok pertama, tetapi dapat melakukan aktivitas secara komersial dalam skala yang kecil; (3) nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yang melakukan penangkapan untuk kesenangan atau berolahraga; serta (4) nelayan komersial (*commercial fishers*), yang menangkap ikan untuk dipasarkan di pasar domestik maupun ekspor.

Selain pengelompokan di atas, terdapat beberapa terminologi yang umumnya digunakan untuk mengategorikan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas penangkapan ikan; nelayan sambilan yang sebagian hidupnya bergantung dengan aktivitas penangkapan ikan; juragan yang memiliki sumber daya ekonomi untuk menjalankan usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; serta anak buah kapal yang memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan milik juragan.

#### **1.6.6. Karakteristik Masyarakat Nelayan**

Karakteristik adalah tanda atau ciri khas yang digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan suatu hal tertentu dari lainnya. Karakteristik ini dapat berupa keunikan dari sifat kejiwaan, akhlak, watak, maupun fitur spesifik dari suatu hal yang melekat pada objek atau konsep tertentu. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik ketidakpastian, di mana mereka belum tentu dapat memperkirakan hasil tangkapan yang diperoleh dan harus menghadapi perubahan iklim sehingga memiliki faktor risiko lebih besar. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya:

- 1) Dari segi mata pencaharian

Nelayan adalah orang yang beraktivitas di lingkungan laut maupun pesisir dan menjadikan sektor perikanan sebagai mata pencaharian.

2) Dari segi cara hidup

Masyarakat nelayan adalah komunitas yang mengutamakan gotong royong untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak.

3) Dari segi keterampilan

Aktivitas nelayan tergolong sebagai pekerjaan kasar, tetapi umumnya hanya dibekali keterampilan sederhana dan tidak dipelajari secara profesional. Mayoritas profesi nelayan adalah pekerjaan turun temurun dari orang tua.

### **1.6.7. Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris '*empowerment*', berarti 'pemberkuasaan'. Istilah ini berakar dari kata 'daya' merujuk pada kekuatan dan kemampuan. Konsep ini memotong lingkaran setan yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Adanya peniadaan kekuatan pada sebagian besar masyarakat mengakibatkan ketiadaan akses produktif yang dimiliki oleh kalangan yang berkuasa (Yulistiana, 2022). Pemberdayaan sebagai alternatif pembangunan berfokus pada otonomi dalam pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat, yang didasarkan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Pemberdayaan bertujuan untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Pemberdayaan (*empowerment*) yang dipaparkan oleh Oakley dan Marsden (dalam Cahyati dkk., 2023) diartikan sebagai suatu proses yang memiliki dua kecenderungan:

- 1) Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan kepada masyarakat agar yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*).
- 2) Kecenderungan sekunder menekankan pada proses dialog, simulasi, atau memotivasi individu agar mampu atau berdaya dalam menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan dalam masyarakat rentan termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini berkaitan dengan kemampuan untuk berpartisipasi, mendapatkan kesempatan, dan mengakses sumber daya layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Sumodiningrat dalam Hamid (2018), pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk memandirikan masyarakat melalui penggalan potensi yang dimiliki individu atau kelompok, kemudian mulai mengembangkannya.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan pemberdayaan adalah mewujudkan kemandirian individu dan masyarakat dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka (Nawalah dkk., 2012). Proses belajar diperlukan untuk mencapai kemandirian ini, sehingga masyarakat secara bertahap dapat mengembangkan kemampuan mereka. Pemberdayaan bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar mencapai kehidupan yang semakin baik dan layak.

#### **1.6.8. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Pemberdayaan dapat dilihat dalam berbagai tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan, sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan respons dari masyarakat. Totok Mardikanto dan Poemvoko Soebianto (2013) menjelaskan pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan kelompok yang kurang beruntung, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan (Julika & Puspaningrum, 2016). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mandiri dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan.

Pemberdayaan menekankan pada keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang diperoleh individu agar dapat memengaruhi kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain yang menjadi perhatian mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak dicapai dengan secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan. Sulistiyani dalam Irawan & Tanzil (2020) mengemukakan tahapan dalam pemberdayaan, antara lain:

##### **1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku**

Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku adalah proses yang dilakukan untuk menuju masyarakat yang mempunyai perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Adanya

kesadaran ini mampu membantu mencapai tujuan pemberdayaan dengan perubahan perilaku guna menciptakan masa depan yang lebih baik.

## 2. Tahap Transformasi Pengetahuan

Tahapan transformasi pengetahuan adalah proses pemberian wawasan, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemberdayaan. Tahap ini dilakukan ketika masyarakat telah sadar dan mau berubah dengan tujuan agar masyarakat yang diberdayakan dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

## 3. Tahap Peningkatan Intelektual

Tahapan peningkatan intelektual adalah proses pemberian daya atau kemampuan kepada masyarakat yang diberdayakan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. Masyarakat yang sudah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan harus terus belajar dan berlatih agar mendekati mereka pada kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu alternatif dalam pembangunan yang mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain tahapan di atas, Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) juga mengungkapkan tiga tahapan dalam pemberdayaan, meliputi:

### 1. Tahap Penyadaran.

Tahap penyadaran adalah proses edukasi masyarakat berupa pemahaman bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk mengembangkan diri. Tahap ini memberi pencerahan untuk menyadari bahwa masyarakat memiliki

potensi dan kemampuan yang dapat dieksplorasi, melalui sosialisasi.

## 2. Tahap Pengkapasitasan

Tahapan pengkapasitasan atau peningkatan kapasitas adalah proses memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola peluang. Proses pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan serupa yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat secara optimal.

## 3. Tahap Pendayaan

Tahapan pendayaan adalah tahap terakhir dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberi peluang atau kesempatan, daya, kekuasaan atau otoritas kepada masyarakat sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan. Masyarakat diberikan peran lebih besar secara bertahap, serta diarahkan untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan yang mereka buat dan hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya

Pemberdayaan masyarakat di atas pada dasarnya serupa dengan pemberdayaan yang diterapkan oleh komunitas nelayan. Pada penelitian Suwandi & Prihatin (2020) di KUB Berkah Samudera Jepara, teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007) berkembang sesuai dengan karakteristik nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut terdiri dari beberapa tahapan berupa:

### 1) Penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan

Kesadaran individu adalah modal awal untuk mendorong partisipasi aktif kelompok nelayan. Pembentukan kesadaran terbagi menjadi tiga proses yang menyertainya, meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Tahap penyadaran pada proses pengetahuan adalah pemberian pemahaman kepada kelompok nelayan untuk mengubah pola pikir mereka agar mandiri tidak bergantung kepada pihak luar maupun bantuan. Kemudian dalam proses sikap, seluruh anggota menerima, merespons, dan menghargai keputusan yang diambil oleh kelompok. Pada proses tindakan, persepsi dan respons positif harus dimiliki oleh anggota terhadap kelompok termasuk dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukannya.

2) Peningkatan kapasitas individu dan kelompok sebagai penunjang keberdayaan

Upaya peningkatan kapasitas adalah langkah untuk mengadakan pertemuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan. Edukasi diadopsi oleh anggota kelompok dengan berbagai penyesuaian terhadap pengetahuan lokal yang sudah dimiliki sebelumnya. Peningkatan kapasitas terbagi atas tiga jenis, antara lain peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas sistem nilai. Peningkatan kapasitas individu berkaitan dengan cara pemberian keterampilan ataupun pengetahuan yang mampu menyelesaikan permasalahan atau risiko melaut yang dihadapi setiap nelayan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kapasitas organisasi melalui

restrukturisasi dan tata kelola organisasi sebagai naungan dari individu dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan nelayan. Peningkatan kapasitas sistem nilai berkaitan dengan upaya membangun harmoni antara nilai yang sudah berkembang di masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan nelayan yang telah dilakukan.

### 3) Peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan

Tahap keberdayaan adalah proses kemandirian dilihat dari bagaimana masyarakat nelayan sebagai subjek pemberdayaan mampu dan berani mengambil keputusan, mengolah sumber daya secara optimal, serta membangun jaringan tanpa bergantung dengan pihak eksternal. Pendayaan memiliki tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Aspek pendayaan politik diwujudkan melalui pengambilan keputusan, pemberian masukan, serta pemberian teguran apabila terjadi penyimpangan dalam keputusan yang diambil kelompok. Konteks pendayaan ekonomi merupakan pendayaan yang paling mudah terukur dan cepat dirasakan masyarakat, terlihat dari pelatihan-pelatihan dan pengembangan yang membawa kebermanfaatannya ekonomi nelayan. Aspek pendayaan sosial berusaha melihat bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari jumlah harta yang dimiliki, tetapi penerimaan dari masyarakat seperti adanya kepercayaan, solidaritas, tata kelola risiko, serta aktualisasi diri.

Memberdayakan adalah mampu memandirikan masyarakat (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Pemberdayaan yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan perlu diimplementasikan dengan sistematis dan runtut agar kesejahteraan

masyarakat nelayan dapat terwujud. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pemberdayaan masyarakat dengan karakteristik yang dimiliki oleh nelayan, peneliti menarik kesimpulan bahwa tahap pemberdayaan masyarakat khususnya dalam kelompok nelayan menurut Suwandi & Prihatin (2020) relevan dengan topik yang akan peneliti teliti.

### **1.6.9. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat**

Keberhasilan suatu organisasi atau komunitas dalam pemberdayaan masyarakat tentu tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat (Nurazizah, 2021) dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat (Haqqie, 2016), sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong
  - a. Sarana dan prasarana: aspek pendukung dalam realisasi suatu program atau kegiatan agar dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan karena dapat memperlancar dan menunjang kegiatan pemberdayaan, terutama melalui pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya terdapat pelatihan-pelatihan yang akan diberikan. Sarana dan prasarana tersebut dapat menjadi cara pengurus untuk mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pemberdayaan.
  - a. Keterlibatan masyarakat: masyarakat yang terlibat dalam hal ini pengurus maupun anggota dalam komunitas nelayan menjadi bentuk motivasi agar masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang ada dan

dapat menjadi bentuk loyalitas. Hal lain yang dapat memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya semangat, keterampilan, dan kegigihan masyarakat atau anggota komunitas nelayan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam membantu merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan berbagai program.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Modal kecil
- b. Penguasaan teknologi rendah
- c. Peluang serta kesempatan kerja yang buruk
- d. Keterbatasan pengembangan sumber daya manusia tidak dikuasainya akses pasar

Faktor lain yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Anggraini dkk. (2015), di antaranya:

### 1. Faktor Pendukung

- a. Keterlibatan masyarakat dan anggota paguyuban nelayan

Keterlibatan anggota dapat dilihat dari beberapa anggota komunitas nelayan yang berpartisipasi secara penuh dan menerima berbagai pelatihan atau sosialisasi dari kegiatan pemberdayaan. Adanya keterlibatan tersebut merupakan bentuk dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan suatu program.

- b. Sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan menunjang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi hambatan-hambatan.

c. Kerja sama dengan pihak lain

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasar sosial yang memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, kerja sama dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas penunjang untuk komunitas nelayan.

2. Faktor Penghambat

a. Pola pikir atau *mindset* yang kurang tepat

Pemikiran yang kurang terbuka terkait visi misi organisasi serta program yang akan dijalankan menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan komunitas nelayan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan perubahan terhadap pemikiran masyarakat agar lebih peduli dan dapat tereduksi.

b. Ketidaksiplinan masyarakat atau anggota komunitas nelayan

Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dapat mengalami hambatan apabila masyarakat kurang memahami prosedur yang ditentukan oleh komunitas nelayan. Ketidaksiplinan sebagai bentuk tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditentukan.

Adapun faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan, baik faktor pendukung maupun penghambat dikemukakan (Margayaningsih, 2018) seperti:

## 1) Faktor Pendukung

### a. Motivasi

Motivasi adalah dorongan internal dalam diri individu yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Motivasi dapat diartikan sebagai sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak.

### b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagiannya adalah berupa arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

## 2) Faktor Penghambat

### a. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran ini sebagai jumlah modal yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu untuk melaksanakan pembangunan.

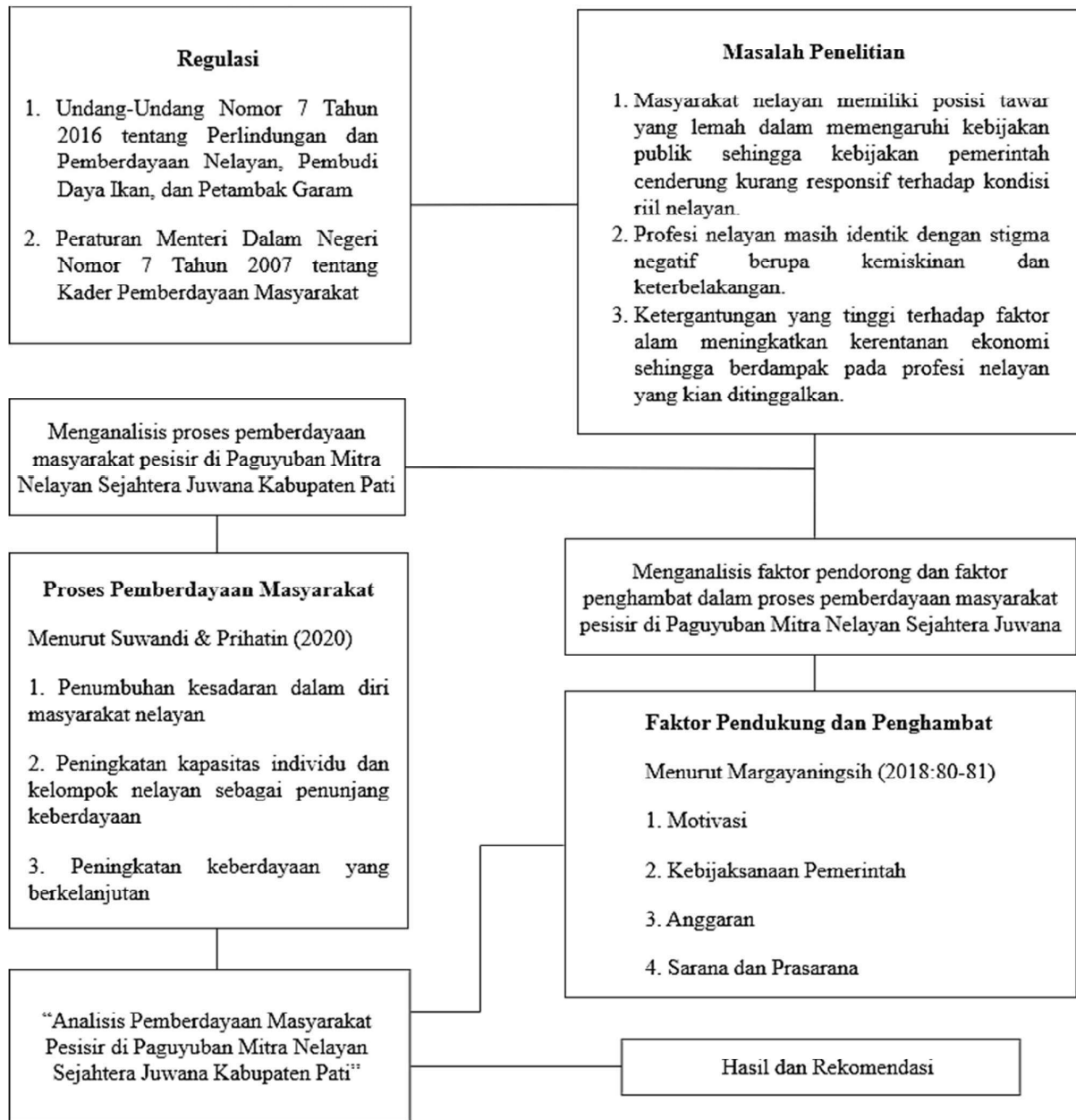
### b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Adanya sarana dan prasarana

mencakup sumber daya, manusia, alat, bahan, metode, ruangan, struktur organisasi, dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai akan memudahkan proses pemberdayaan dan dapat mencapai tujuan, yaitu kemandirian.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari suatu pemberdayaan yang akan dilakukan kepada masyarakat bergantung pada kondisi masyarakat tersebut dan kondisi lingkungan sekitarnya. Pada penelitian ini, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dapat dilihat dengan menggunakan pendapat dari (Margayaningsih, 2018).

### 1.6.10. Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

### **1.7. Operasionalisasi Konsep**

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan daya kepada masyarakat nelayan melalui pengembangan potensi, kemampuan, dan menambah pengetahuan nelayan mengenai sektor perikanan dan kelautan yang bersifat berkelanjutan. Hal tersebut berguna untuk mendidik para nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Bendar melalui beberapa program yang terdapat di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat nelayan serta faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui dimensi dan indikator pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, peneliti mengadopsi pendapat dari Suwandi & Prihatin (2020). Pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

#### 1) Penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan

Tahap penumbuhan kesadaran atau penyadaran merupakan tahap pertama dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif kelompok nelayan. Dalam menganalisis penumbuhan kesadaran masyarakat nelayan terutama Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman kepada anggota untuk memengaruhi pola pikir.
  2. Sikap seluruh anggota dalam merespons diskusi.
  3. Tindakan berupa persepsi dan respons positif anggota terhadap terhadap kegiatan pemberdayaan.
- 2) Peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan sebagai penunjang keberdayaan

Tahap peningkatan kapasitas adalah langkah untuk mengadakan pertemuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan. Adapun fenomena yang dilihat pada tahap peningkatan kapasitas ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pengetahuan dan keterampilan yang mampu menyelesaikan permasalahan anggota.
  2. Adanya peningkatan kapasitas organisasi sebagai naungan dari anggota dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.
  3. Upaya membangun harmoni antara nilai yang sudah berkembang di masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan nelayan.
- 3) Peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan

Tahap keberdayaan merupakan tahap yang bertujuan untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana agar dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan minatnya. Dalam menganalisis

pendayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Proses kemandirian masyarakat nelayan dalam mengelola sumber daya secara optimal.
2. Keberanian anggota mengambil keputusan dan memberi masukan.
3. Peningkatan kebermanfaatan ekonomi anggota.

Sementara itu, untuk mengetahui dimensi dan indikator faktor yang memengaruhi, baik faktor pendorong maupun penghambat dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, peneliti mengadopsi pendapat dari (Margayaningsih, 2018) sebagai berikut:

#### 1) Motivasi

Motivasi adalah dorongan internal dalam diri individu yang dapat menginspirasi individu untuk melakukan tindakan atau perubahan yang positif. Dalam menganalisis pendayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Dorongan internal dan eksternal dalam diri individu.
2. Adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan, dan cita-cita.
3. Sesuatu yang membuat seseorang bertindak.

#### 2) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan yang

ditetapkan pemerintah. Dalam menganalisis pendayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Adanya perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah.
2. Arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi.

### 3) Anggaran

Anggaran yaitu jumlah modal yang dimiliki kelompok dan disusun dalam rencana sistematis. Dalam menganalisis pendayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Rencana yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter
2. Adanya modal yang dimiliki kelompok

### 4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adanya sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaan tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia. Hal ini karena masyarakat nelayan belum memahami hal-hal yang menjadi potensinya di luar sumber daya alam pesisir. Dalam menganalisis pendayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Sumber daya, metode, ruangan, struktur organisasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat di atas, peneliti tidak membedakan antara faktor pendorong (positif) dan faktor penghambat (negatif). Alasannya, peneliti melihat pemberdayaan masyarakat sebagai proses yang sangat kompleks dan dinamis, sehingga dalam praktiknya faktor memungkinkan untuk berperan ganda. Faktor yang awalnya dianggap sebagai pendorong tidak jarang dapat berubah menjadi penghambat jika terjadi berbagai perubahan, dan sebaliknya. Demikian, peneliti dapat menjaga fleksibilitas relevansi dan kedalaman analisis dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan dengan dinamika yang kompleks.

Adapun fenomena penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yaitu:

**Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep**

<b>Fenomena</b>	<b>Gejala</b>	<b>Sub Gejala</b>	
Pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati	Penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan	Pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana untuk memengaruhi pola pikir	
		Sikap seluruh anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dalam merespons diskusi	
		Tindakan berupa persepsi dan respons positif anggota terhadap Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan	
	Peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan sebagai penunjang keberdayaan	Pemberian pengetahuan dan keterampilan yang mampu menyelesaikan permasalahan anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana	
		Adanya peningkatan kapasitas organisasi Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana sebagai naungan dari anggota dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan	
		Upaya membangun harmoni antara nilai yang sudah berkembang di masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan nelayan yang telah dilakukan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana	
	Peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan	Proses kemandirian masyarakat nelayan dalam mengelola sumber daya secara optimal	Keberanian anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana mengambil keputusan dan memberi masukan

<b>Fenomena</b>	<b>Gejala</b>	<b>Sub Gejala</b>
		Peningkatan kebermanfaatan ekonomi anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana
Faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat	Motivasi	Adanya dorongan internal dan eksternal, kebutuhan, harapan, serta cita-cita yang mendorong anggota komunitas nelayan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana untuk melakukan pemberdayaan
	Kebijaksanaan Pemerintah	Adanya perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, serta arahan yang menjadi pedoman komunitas nelayan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana
	Anggaran	Adanya rencana yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam kesatuan moneter oleh komunitas nelayan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana
		Adanya modal yang dimiliki oleh komunitas nelayan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana
Sarana dan Prasarana	Adanya sumber daya, metode, ruangan, struktur organisasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan komunitas nelayan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

### **1.8. Argumen Penelitian**

Penelitian ini menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana. Peneliti berargumen bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan dan ketercapaian tujuan bersama. Masyarakat nelayan yang berdaya akan mampu meningkatkan daya dan kekuasaan khususnya kelompok yang lemah. Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana merupakan salah satu komunitas nelayan yang berada di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana didirikan sebagai wadah bagi para pemilik kapal untuk mengakomodasi kepentingan nelayan pemilik kapal *purse seine*. Secara khusus, keberadaan paguyuban ini untuk menjaga keberlangsungan usaha para anggotanya di bidang usaha perikanan tangkap. Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui paguyuban ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan atau komunitas pesisir, serta meningkatkan pelibatan nelayan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan usaha perikanan tangkap. Nelayan yang terlibat dalam politik akan memperjuangkan hak-hak kesejahteraan komunitasnya dan nelayan lain.

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi, maka diperlukan analisis terkait pemberdayaan nelayan melalui tiga tahapan pemberdayaan. Berdasarkan diskursus teori yang sudah peneliti lakukan, yaitu penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan, peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan sebagai penunjang keberdayaan, serta peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan diikuti dengan karakteristik yang dimiliki nelayan. Terdapat empat faktor pendorong dan

penghambat yang memengaruhi proses pemberdayaan tersebut, di antaranya motivasi, kebijaksanaan pemerintah, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan fokus penelitian, yaitu tentang analisis pemberdayaan masyarakat pesisir. Merujuk pada penelitian terdahulu, apabila dilihat dari segi manajemen publik belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan pemilik kapal *purse seine*. Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, belum terdapat kajian yang menempatkan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana di Kabupaten Pati sebagai lokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat di komunitas nelayan pemilik kapal *purse seine* melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir terutama melalui komunitas nelayan dengan modal besar maupun menengah.

### **1.9. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana uraian masalahnya dilakukan secara induktif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menganalisis masalah secara mendalam untuk mengumpulkan informasi mengenai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana terkait dengan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan. Pendekatan kualitatif ini dirasa cocok digunakan dalam penelitian

karena metode ini dapat menemukan dan memahami makna atau hal-hal yang tidak terlihat dalam fenomena penelitian berupa proses pemberdayaan yang sulit untuk ditafsirkan.

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai bagaimana keadaan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana yang dilihat berdasarkan tahapan-tahapan pemberdayaan yang ada. Selain itu, juga untuk melihat faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana.

### **1.9.2. Situs Penelitian**

Situs penelitiannya berkenaan dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian, atau dapat berupa sebuah lembaga atau organisasi. Situs penelitian ini adalah Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian berkenaan dengan narasumber atau informan dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian

ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan hal ini, peneliti menentukan individu yang berpotensi memberikan informasi mengenai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, yaitu:

**Tabel 1.5 Informan Penelitian**

No.	Instansi/ Asal
1.	Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI)
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati
3.	Pengurus Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana
4.	Anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana
5.	Masyarakat Pesisir Sekitar Kecamatan Juwana

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

#### **1.9.4. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini sifatnya adalah data kualitatif. Hal ini karena pada saat pembuatan laporan penelitian bentuknya adalah narasi atas kejadian yang sebenarnya yang ditemukan di lapangan. Data kualitatif tersebut didapatkan dari berbagai sumber, salah satunya yakni studi literatur dari berbagai artikel jurnal dan buku yang membahas mengenai proses pemberdayaan, serta wawancara bersama informan yang telah ditentukan dengan data kualitatif berupa transkrip wawancara. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana.

#### **1.9.5. Sumber Data**

Sumber data mengacu pada setiap pernyataan dan tindakan yang diperkuat

dengan penelaahan referensi lainnya. Oleh karena itu, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah informasi pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti, seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan dalam sesi wawancara atau data yang dikumpulkan melalui observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan secara langsung dari informan terpilih, yaitu BBPI, DKP Kabupaten Pati, Pengurus Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana, Anggota Paguyuban MNS Juwana, dan masyarakat pesisir sekitar Kecamatan Juwana. Mereka yang dipilih sebagai aktor yang berkaitan maupun bersinggungan dengan kegiatan atau program pemberdayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana sehingga didapatkan informasi yang lengkap dari sudut pandang yang menyeluruh.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung data primer tetapi diperoleh secara tidak langsung. Umumnya, data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai referensi, catatan, dokumen, dan bahan sejenis lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, RPJMD Kabupaten Pati, Renstra DKP Kabupaten Pati, serta laporan kegiatan dan keanggotaan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana.

### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dan mengefisienkan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan proses pengamatan langsung yang melibatkan peneliti untuk mengamati dan mencatat seluruh fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti mengamati instansi pemerintah seperti BBPI dan DKP Kabupaten Pati untuk mengetahui peran yang dimiliki pemerintah dalam pemberdayaan komunitas nelayan. Sementara itu, peneliti juga mengamati Pengurus Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana, Anggota Paguyuban MNS Juwana, dan masyarakat pesisir sekitar Kecamatan Juwana untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas yang dilakukan dalam rangka Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dan informan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, di mana informan diberi tahu mengenai tujuan kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan dengan BBPI, DKP Kabupaten Pati,

Pengurus Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana, Anggota Paguyuban MNS Juwana, dan masyarakat pesisir sekitar Kecamatan Juwana.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan keakuratan serta kebenaran data yang dikumpulkan dari dokumen yang ada di lapangan, serta sebagai bahan dalam memverifikasi keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari arsip dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini, baik yang ada di lokasi penelitian maupun di luar lokasi. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Paguyuban Nelayan Sejahtera Juwana, pihak BBPI, DKP Kabupaten Pati, dan masyarakat pesisir di sekitar Kecamatan Juwana.

### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan menelaah referensi yang ada. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel, literatur, dan catatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan di Paguyuban Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati.

#### **1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang menurut (Sugiyono, 2013) terdiri dari tiga komponen berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses penguraian data yang telah diperoleh dari lapangan dengan merincikan seluruh fenomena yang diamati. Fokusnya adalah pada penguraian hanya untuk poin-poin penting, yang dilakukan secara terus menerus selama durasi penelitian. Setelah data direduksi, seluruh informasi akan diringkas, ditelaah, dan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang menggambarkan fenomena terkait pemberdayaan Paguyuban Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati secara rinci, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan dan memutuskan tindakan yang tepat.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari data penelitian harus dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Proses ini melibatkan penelaahan pola, tema, dan hubungan antar variabel untuk mencapai kesimpulan akhir yang relevan. Sebuah kesimpulan bersifat tentatif, karena kemungkinan adanya perubahan selama proses penelitian.

#### **1.9.8. Kualitas Data**

Menurut (Sugiyono, 2013) standar dari validnya sebuah data didefinisikan sebagai keabsahan data penelitian yang menunjukkan seberapa besar data akan menunjukkan nilai kebenaran. Dalam mengetahui kualitas data, maka dilakukan

triangulasi data. Pada penelitian ini, penulis memilih validitas data dengan pendekatan triangulasi agar dapat menganalisis bagaimana kondisi yang terjadi dalam meneliti Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati. Dalam menguji kredibilitas penelitian ini, peneliti mengumpulkan serta menguji data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Kemudian data tersebut ditranskripsikan secara verbal, dideskripsikan, dikelompokkan, dan dianalisis sesuai dengan sumber-sumber yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana ini, kualitas data yang diaplikasikan adalah triangulasi sumber. Penggunaan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan kepada informan yang hasilnya akan dideskripsikan, dikategorisasikan, dan diambil kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data yang bervariasi dari satu sumber, yaitu data dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati. Kemudian, uji keabsahan data dilaksanakan melalui cara berikut:

- 1) Peneliti membandingkan hasil dari wawancara dari Ketua Paguyuban MNS Juwana, Wakil Ketua I Paguyuban MNS Juwana, Sekretaris I Paguyuban MNS Juwana, dan anggota Paguyuban MNS Juwana.
- 2) Peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati.